

## Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sindangmulya

Rika Julianti<sup>1</sup>, Udin Saepudin<sup>2</sup>, Syamsul Bahri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertiwi

e-mail: [19110085@pertiwi.ac.id](mailto:19110085@pertiwi.ac.id)<sup>1</sup>, [udin.saepudin@pertiwi.ac.id](mailto:udin.saepudin@pertiwi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[syamsul.bahri@pertiwi.ac.id](mailto:syamsul.bahri@pertiwi.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak Bumi dan bangunan di Desa Sindangmulya Kota Kecamatan Cibusah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwabahwa tingkat pendidikan, berpengaruh secara negatif, jenis pekerjaan tidak berpengaruh, dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap pembayaran PBB P. dan secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa dari Tingkat Pendidikan, Kesadaran wajib pajak, Jenis pekerjaan, dan Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap pembayaran PBB P2.

**Kata kunci:** *Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Pajak Bumi dan Bangunan.*

### Abstract

The aim of this research is to determine the effect of education level, type of work and income level on land and building tax payments in Sindangmulya Village, Cibusah District City. This research method uses a quantitative approach. The results of this study show that the level of education has a negative effect, the type of work has no effect, and the level of income has an effect on PBB P payments and partially (T test) shows that the level of education, taxpayer awareness, type of work and level of income have an effect. towards PBB P2 payments.

**Keywords:** *Education Level, Type of Work, Income Level, Land and Building Tax.*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu negara yang berlandaskan terhadap hukum material atau hukum sosial, yang mana menganut dan menerapkan sebuah prinsip pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Memiliki dana yang cukup untuk melakukan pembangunan menjadi faktor

yang berperan penting dalam meraih tujuan yang diharapkan. Salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan memungut pajak.

Pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan “Motor Penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat, dan saat terutangnya dibayar pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan.

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan dana untuk pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah melalui pajak.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No. 28 Tahun 2009. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal 1 Januari 2010 tentang Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sudah diperbolehkan untuk menerima pengalihan pemungutan dan pengelolaannya. Maka penyelenggaraan pemerintahan daerah di lakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan alasan tersebut, pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah di tingkat Desa untuk mengingatkan dan mengkoordinir warganya agar taat dan tepat waktu dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan aturan tersebut, Maka pemerintah Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya

adalah menangani permasalahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya pajak bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat sangat berperan juga dalam tercapainya program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Hubungan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya cita-cita pembangunan nasional. Salah satu faktor utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut adalah masyarakat yang mampu menempatkan antara hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam penggunaan tanah dan bangunan yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia, Masyarakat khususnya wajib pajak berkewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas manfaat yang didapatkan dalam penggunaan tanah dan bangunan tersebut. Namun pada pelaksanaannya, tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya tersebut, masih banyak ditemui masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat pada waktunya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan daerah bisa bertambah hingga Rp 30,1 triliun dengan adanya kenaikan pajak di daerah. Kenaikan pajak di daerah ini tentu akan menambah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB). Adapun kebijakan baru PDRD tertuang dalam Undang-Undang (UU) tentang Harmonisasi Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang baru saja disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna. 'Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia 07 December 2021"

"Perubahan pengaturan pajak daerah termasuk tarif, justru akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022. Selasa (7/12/2021). Adapun simulasi yang dijabarkan Sri Mulyani dari penambahan PDRB ini, yakni bagi kabupaten/kota diperkirakan dapat meningkat dari Rp 61,2 triliun menjadi Rp 91,3 triliun atau meningkat hingga 50%. Dengan demikian maka ada penambahan Rp 30,1 triliun untuk penerimaan daerah di 2022.

Dalam UU HKPD ini, salah satu tarif pajak yang diubah atau naik adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan tersebut tertuang dalam Pasal 41 UU HKPD. Dituliskan bahwa batas atas tarif PBB Pedesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%. Tarif ini lebih tinggi dari ketentuan batas maksimal tarif PBB-P2 yang berlaku saat ini sebesar 0,3%.

Tarif PBB yang Membebani Rakyat Beberapa tahun terakhir masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan. Sebagian masyarakat memilih menunggak atau menjual lahan dan bangunan pindah ke pinggiran kota.

Masyarakat mengeluhkan kenaikan yang terus-menerus terjadi pada tarif Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Di tengah kondisi ekonomi yang berat, sebagian masyarakat tak sanggup menanggung tambahan beban pengeluaran rutin setiap tahun untuk membayar dan memilih menunggak PBB atau menjual lahan dan bangunan miliknya dan pindah ke pinggiran kota yang PBB-nya lebih murah. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas hunian dari yang bersangkutan.

PBB menasar semua orang pribadi dan badan yang mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Karena obyek bumi adalah sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan obyek bangunan adalah rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar, kolam renang, jalan tol, maka dari petani hingga buruh, mulai dari pensiunan sampai pengusaha besar, semua memiliki kewajiban dalam hal PBB ini.

Pajak atas tanah sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI meneruskan pemungutan pajak atas tanah dengan nama Pajak Bumi. Pajak Bumi dihapus dengan Undang-Undang (UU) No 14/1951, digantikan Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP). Lalu, tahun 1959 PPTP berubah menjadi Pajak Hasil Bumi (PHB) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 11/1959 yang dengan UU No 1/1961 ditetapkan menjadi UU. "SISWONO YUDO HUSODO 19 Mei 2022 Kompas".

Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil suatu perencanaan menyeluruh melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dan didorong oleh kebutuhan praktis dibawah pengaruh kondisi social, ekonomi, dan politik di Netherland maupun di Hindia Belanda. Selain itu kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercepatnya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap yang akhirnya, setidaknya dalam teori, memberi kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan juga sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak (Nasution 2014,1).

Menurut Badan Pusat Statistik (2002 : viii) jenis pekerjaan adalah kumpulan pekerjaan yang cukup bersamaan tugas utamanya sehingga bisa digabungkan bersama dalam satu kelompok dalam keseluruhan sistem klarifikasi. Menurut Purwantini dan Bondan (Ayu, dkk, 2012:6), wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja cenderung akan menyelesaikan karakteristik pimpinanya, dimana jika pemimpin tersebut bersikap positif maka wajib pajak juga akan bersikap positif dan jika pemimpin tersebut bersikap negatif maka wajib pajak juga akan bersikap negatif. Hal tersebut berbeda dengan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan cenderung bersikap positif. Sehingga faktor jenis pekerjaan akan berpengaruh dalam pembayaran wajib pajak.

Dalam pengertian umum pendapatan adalah hasil pencarian usaha. Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010). Sedangkan menurut Gilarso dalam Faizah (2009:29) pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi. Berdasarkan definisi singkat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima oleh orang yang berupa uang atau barang sebagai balas jasa dari faktor-faktor produksi.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa “Kelurahan adalah suatu wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten dan atau daerah kota di bawah Kecamatan”. Kepemimpinan dalam suatu wilayah Kelurahan yang di bebaskan kepada seorang Lurah, menjadi hal penting dalam menumbuhkan kesadaran warganya, yang juga merupakan sebuah faktor penting dalam menopang pembangunan Kelurahan tersebut.

Pembayaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Terdapat beberapa faktor pendukung pembayaran wajib pajak yaitu dari faktor jenis tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat Pendapatan.

Untuk menciptakan cita-cita pembangunan nasional ke arah masyarakat adil dan makmur diperlukan peran kepatuhan pembayaran pajak. Disadari bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpajakan masih belum memadai dan oleh karena itu dibutuhkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Namun, kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dalam hal kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat pendidikan, pengetahuan, jenis pekerjaan, serta tingkat Pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan terutama dari tingkat yang paling bawah yaitu Desa.

**Tabel 1. Target Dan Realisasi Penerimaan Pbb-P2 Desa Sindangmulya Tahun Anggaran 2020-2022**

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2020	1.554.589.153	820.927.444	42
2.	2021	1.198.404.969	627.519.122	48,33
3.	2022	1.209.479.647	575.516.305	43,95
Rata-rata				45

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan peran dari pemerintahan desa sebagai pemerintahan tingkat paling bawah untuk dapat memanfaatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di daerahnya dan memotivasi aparatnya dan masyarakat agar dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak.

Masalah-masalah yang didapati di dalam masyarakat yang ada di Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah dimana masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya, bersifat acuh tak acuh dengan alasan kurang atau bahkan tidak mengerti pajak, tingkat pendidikan, jenis pekerjaannya, serta tingkat Pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, dan juga tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai batas waktu

pembayaran pajak dari pemerintah setempat, sementara dipihak lain rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perpajakan yang berlaku sangat berpengaruh terhadap kesadaran mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan dan hal-hal seperti inilah yang menjadi kendala bagi pemerintah terutama di tingkat desa dalam menjalankan tugas yang sudah dibebankan kepadanya dan jika hal ini dibiarkan maka sulit bagi pemerintah baik pusat maupun daerah mengharapkan tumbuhahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Sindangmulya Kota Kecamatan Cibarusah yang berada di wilayah dekat ibukota Kabupaten Bekasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling atau incidental sampling. Menurut Santoso dan Tjiptono (2001) accidental sampling(convenience sampling) adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pelaku Wajib Pajak yang berada di daerah Cibarusah.

Pelaku Wajib Pajak yang bersedia mengisi kuesioner.

Analisis data penelitian ini menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Uji Validitas dan reliabilitas perlu diadakan pada alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari indikator-indikator program komputer SPSS. Berikut hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari variabel dalam penelitian yang akan diujikan dapat dilihat dibawah ini.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan antra nilai r hitung dengan r tabel untuk degre of freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 53. maka besarnya df dapat dihitung dengan  $53-2=51$ . dengan df=51 dan alpha=5% didapat r tabel = 0,2706 (dengan melihat r tabel pada df=51 dengan dua arah). Adapun pengambilan keputusan apabila nilai r hitung > r tabel (0,2706), maka butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan valid serta jika nilai r hitung < r tabel (0,2706), maka butir pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan tidak valid . berikut hasil pengujian validitas dibantu dengan dengan program spss.

**Tabel 1. Uji Validitas**

Item pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,522	0,2706	Valid
P2	0,618		Valid
P3	0,247		Tidak Valid
P4	0,443		Valid

P5	0,492	Valid
P6	0,506	Valid
P7	0,672	Valid
P8	0,603	Valid
P9	0,406	Valid
P10	0,521	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas diatas untuk pembayaran PBB (Y), P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 > t tabel dan P3 < t tabel maka tidak valid. Maka indikator-indikator pada variabel Y valid kecuali pada indikator P3. pertanyaan yang tidak valid dibuang dalam angket.

## 2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan reliabel. Reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Teknik pengambilan keputusan apakah instrumen telah reliabel adalah jika cronbach alpha > 0,6 (Ghozali, 2005:129). berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk pendapatan PBB (Y).

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Reliability Statistics	
Cronbachs Alpha	N of Items
0,687	9

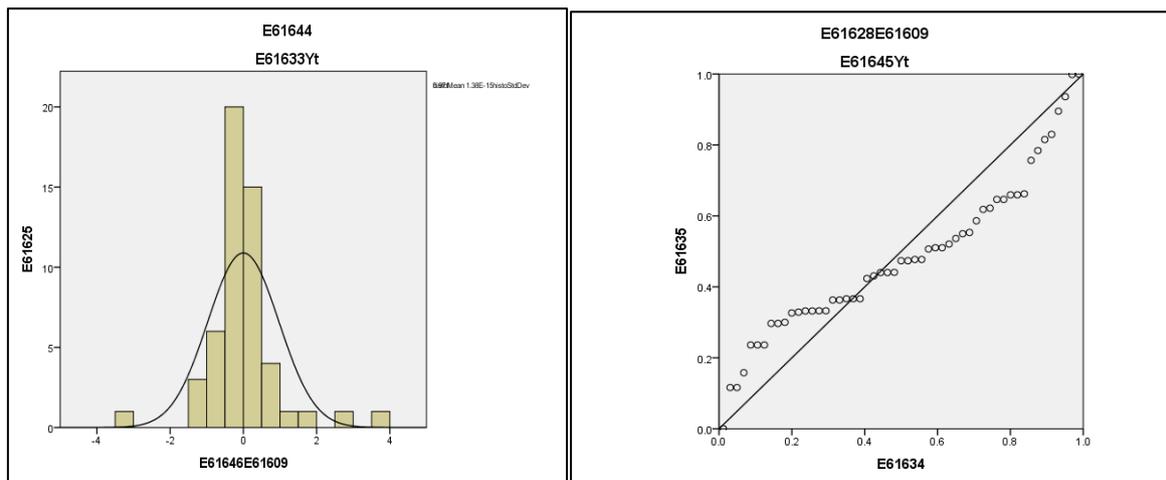
Berdasarkan pengujian reliabilitas diatas nilai cronbach alpha sebesar 0,687 lebih besar dari 0,6 maka instrumen yang digunakan reliabel.

## Analisis Regresi Berganda

### 1. Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residual yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik P-P plot. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal
- 2) Jika data jauh dari disekitar garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi tidak berdistribusi normal
- 3) Berikut hasil P-P plot menggunakan bantuan program SPSS.



**Gambar 1. Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar output diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik-tik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal selain itu gambar histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang artinya data berdistribusi normal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

2. Heteroskedastisitas Spearman

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas Spearman**  
**Correlations**

			Tingkat Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Tingkat Penghasilan	Unstandize d Residual
Spearman's rho	Tingkat Pendidikan	Correlation Coefficient	1.000	-.226	.703**	.196
		Significance (2-tailed)	.	.104	.000	.160
		N	53	53	53	53
	Jenis Pekerjaan	Correlation Coefficient	-.226	1.000	-.403**	-.160
		Significance (2-tailed)	.104	.	.003	.253
		N	53	53	53	53
	Tingkat Penghasilan	Correlation Coefficient	.703**	-.403**	1.000	.076
		Significance	.000	.003	.	.587

		(2-tailed)				
		N	53	53	53	53
Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.196	-.160	.076	1.000	
	Significance (2-tailed)	.160	.253	.587	.	
	N	53	53	53	53	53

\*\* . Corr. is significant at .01 level 2-tail...

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dari variabel tingkat pendidikan sebesar 0,160, yang artinya  $0,160 > 0,05$ . Nilai signifikansi dari variabel jenis pekerjaan sebesar 0,253, yang artinya  $0,253 > 0,05$ . Nilai signifikansi dari variabel tingkat penghasilan sebesar 0,587, yang artinya  $0,587 > 0,05$ . Dengan kata lain nilai dari variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

### 3. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi antara lain dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi, dapat dilihat dari jika nilai VIF (Variance Inflation Factor) tidak melebihi 10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Dan jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas.

**Tabel 4. Uji Multikoloniearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Tingkat Pendidikan	.505	1.979
	Jenis Pekerjaan	.843	1.187
	Tingkat Penghasilan	.455	2.199

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil diatas dapat dilihat nilai tolerance variabel tingkat pendidikan sebesar 0,505, variabel jenis pekerjaan sebesar 0,843, dan variabel tingkat penghasilan sebesar 0,455. Sementara itu, nilai VIF variabel tingkat pendidikan sebesar 1,979, variabel jenis pekerjaan sebesar 1,187, dan variabel tingkat penghasilan sebesar 2,199. Dari hasil diatas dapat dilihat nilai tolerance bahwa untuk variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,

dan tingkat penghasilan > 0,10 dan nilai VIF < 10, ini berarti hasil itu menyimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan.

4. Korelasi

**Tabel 5. korelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.686 <sup>a</sup>	.470	.438	1.44218

a. Predictors: (constant) Tingkat Penghasilan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendidikan...

b. Dependent Variable: Y

Pada tabel diatas angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0,47. Nilai R Square berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2 semakin bagus garis regresi yang terbentuk. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Angka Adjusted R Square adalah 0,438 artinya 43,8% variabel terikat pendapatan PBB dijelaskan oleh Variabel bebas yang terdiri dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Jadi sebagian besar variabel terikat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan model lain.

5. Persamaan Regresi Linear Berganda

**Tabel 6. Uji Regresi Linear Berganda**

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.008	.994		29.189	.000
	Tingkat Pendidikan	-1.941	.308	-.922	-6.307	.000
	Jenis Pekerjaan	-.032	.205	-.018	-.157	.876
	Tingkat Penghasilan	1.262	.437	.445	2.887	.006

a. Dependent Variable: Y

Output diatas dari tabel Coefficients digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi berikut ini:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$  atau  
 Pendapatan PBB = 29,008 – 1,941 (Tingkat Pendidikan) – 0,32(Jenis Pekerjaan) + 1,262 (Tingkat Penghasilan)

- Kostanta sebesar 29,008 menyatakan bahwa jika tidak ada tingkat nilai tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan maka pendapatan PBB sebesar (29,008).
- Koefisien regresi X1 sebesar -1,941 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda negatif) 1 poin , tingkat pendidikan akan menurunkan pendapatan PBB sebesar 1,941. Dan sebaliknya, jika tingkat pendidikan turun sebesar 1 poin, maka akan menaikkan pendapatan PBB sebesar 1,941 dengan anggapan X2 dan X3 tetap.
- Koefisien regresi X2 sebesar -0,32 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda negatif) 1 poin , jenis pekerjaan akan menurunkan pendapatan PBB sebesar 0,32. Dan sebaliknya, jika jenis pekerjaan turun sebesar 1 poin, maka akan menaikkan pendapatan PBB sebesar 0,32 dengan anggapan X1 dan X3 tetap.
- Koefisien regresi X3 sebesar 1,262 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 poin, tingkat penghasilan akan menaikkan pendapatan PBB sebesar 1,262. Dan sebaliknya, jika tingkat penghasilan turun sebesar 1 poin , maka akan menurunkan pendapatan PBB sebesar 1,262 dengan anggapan X1 dan X2 tetap.

6. Uji Hipotesis

a) Uji t Secara Parsial

Untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara individu antara X1 (tingkat pendidikan) terhadap Y (pendapatan PBB), X2 (jenis pekerjaan) terhadap Y (pendapatan PBB), dan X3 (tingkat penghasilan) terhadap Y (pendapatan PBB).

**Tabel 7. Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Significance	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	29.008	.994		29.189	.000
	Tingkat Pendidikan	-1.941	.308	-.922	-6.307	.000
	Jenis Pekerjaan	-.032	.205	-.018	-.157	.876
	Tingkat Penghasilan	1.262	.437	.445	2.887	.006

a. Dependent Variable: Y

- Dalam tabel coefficients diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan PBB. Atau dengan cara kedua, dalam tabel Coefficients diperoleh nilai t tabel sebesar 2,00758 diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 2 = 53 - 2 = 51$ , dengan ketentuan nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} = -6,307 < 2,00758$  dapat dilihat bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, maka hipotesis tidak teruji.

Sehingga tingkat pendidikan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pendapatan PBB.

- Dalam tabel coefficients diperoleh nilai sig. sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka  $0,595 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan jenis pekerjaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan PBB. Atau dengan cara kedua, dalam tabel Coefficients diperoleh nilai t tabel sebesar 2,00758 diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 2 = 53 - 2 = 51$ , dengan ketentuan nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} = -0,157 < 2,00758$  dapat dilihat bahwa t hitung lebih kecil dari t tabel, maka hipotesis tidak teruji. Sehingga jenis pekerjaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pendapatan PBB.
- Dalam tabel coefficients diperoleh nilai sig. sebesar 0,006 dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 5\%$ ) 0,05, maka  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan tingkat penghasilan berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan PBB . Atau dengan cara kedua, dalam tabel Coefficients diperoleh nilai t tabel sebesar 2,00758 diperoleh dengan mencari nilai  $df = n - 2 = 53 - 2 = 51$ , dengan ketentuan nilai  $\alpha = 5\%$  atau 0,05. Dari nilai tersebut dapat diketahui bahwa  $t_{hitung} = 2,887 > 2,00758$  dapat dilihat bahwa t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis teruji. Sehingga tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan PBB

b) Uji f Secara Simultan

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh secara simultan atau bersama-sama tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan terhadap pendapatan PBB diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 8. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Significance
1	Regression	90.522	3	30.174	14.508	.000 <sup>b</sup>
	Residual	101.914	49	2.080		
	Total	192.436	52			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (constant) Tingkat Penghasilan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendidikan...						

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian hipotesis dengan uji f pada pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan terhadap pendapatan PBB, diperoleh hasil sebesar  $f_{hitung}$  sebesar 14,508 dengan signifikansi (*pvalue*) sebesar 0,000, dikarenakan hasil  $f_{hitung} > f_{tabel}$  ( $14,508 > 2,79$ ) dan signifikansi (*pvalue*)  $0.000 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan terhadap pendapatan PBB.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Desa Sindangmulya Cibarusah Bekasi, maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu: Pengujian hipotesis yang dilakukan secara bersama-sama (uji F) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, berpengaruh secara negatif, jenis pekerjaan tidak berpengaruh, dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap pembayaran PBB P. dan secara parsial (uji T) menunjukkan bahwa dari Tingkat Pendidikan, Kesadaran wajib pajak, Jenis pekerjaan, dan Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap pembayaran PBB P2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu permatasari, G. W. (2022). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PONOROGO. *JURNAL REVENUE*.
- Enl Dwi Susliyanti, S. M. (2022). PENGARUH KESADARAN, TINGKAT PEMAHAMAN, TINGKAT PENDAPATAN DAN LINGKUNGAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIMASA PANDEMI COVID - 19 DI KECAMATAN KALASAN. *KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS*.
- Erlindawati, R. N. (2020). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, KESADARAN DAN PELAYANAN TERHADAP TINGKAT MOTIVASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *JURNAL ILMIAH EKONOMI KITA*.
- Hamzah Firmansyah, H. N. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI DESA PADAMUKTI TAHUN 2018-2020. *JURNAL MANAJEMEN TERAPAN DAN KEUANGAN*.
- HUSODO, S. Y. (2022). Tarif PBB Yang Membebani Rakyat.
- Kadek Windy Astari, A. Y. (2022). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, KESADARAN WAJIB PAJAK, KEBIJAKAN PAJAK, DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BADUNG. *KHARISMA*.
- M. Hasan Ma'ruf, S. S. (2020). Fakto-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JAP*.
- Neneng Khoiriah, S. K. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Petrus Gani, Y. F. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). *JURNAL AUDIT DAN PERPAJAKN*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). *PERPAJAKAN*. JAKARTA.
- Rahman, A. (2018). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN . *JURNAL AKUNTANSI*.

- Rahman, A. (2021). PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PENDAPATAN, NASIONALISME, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( STUDI KASUS ; DESA SLARANG KIDUL KECAMATAN LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL). *UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL*.
- Safitra, D. A. (2022). STUDI KOMPARASI STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN. *JURNAL ANGGARAN DAN KEUANGAN NEGARA INDONESIA (AKURASI)*.
- Sembiring, L. J. (2021). Siap-siap! Tarif PBB Bakal Segera Naik. *CNBC Indonesia*.
- SINAGA, S. B. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN*.
- Sudaryono, D. (2022). *METODOLOGO PENELITIAN*. DEPOK.
- Widya Vinda Indriyasari, M. (2022). PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNANDI DESA GEBUGAN, KECAMATAN BERGAS, KABUPATEN SEMARANG. *JURNAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI POLITEKNIK GANESHA*.